

Analisis Pembiayaan Organisasi Sekolah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Menggunakan *Activity Based Costing*

Aniss Fatul Fu'adah¹, Alfiani Nur Fitrotin², Nanda Amalia Fadilah³, Muhammad Ainul Yaqin⁴

Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

²17650033@gmail.com; ³17650052@student.uin-malang.ac.id; ⁴yaqinov@ti-uin-malang.ac.id;

*corresponding author

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: 23 Desember 2020
Direvisi: 6 Januari 2021
Diterbitkan: 30 Agustus 2023

Kata Kunci

Activity Based Costing
Pembiayaan Organisasi Sekolah
Standar Nasional Pendidikan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan pada organisasi sekolah yang. Pembiayaan adalah proses dialokasikannya dana pada aktivitas atau suatu program pelaksanaan operasional pada sebuah proses bisnis. Pembiayaan tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan, akan tetapi pembiayaan juga penting dalam organisasi, salah satunya organisasi sekolah. Oleh karena itu, organisasi sekolah perlu mengetahui bagaimana keadaan pembiayaan sekolah yang sesuai dengan SNP. Data yang diperoleh dari *Work Breakdown System* (WBS) terhadap SNP diterapkan ke dalam ABC yang akan menghasilkan biaya yang dihitung dengan penerapan metode *Activity Based Costing* (ABC) dialokasikannya biaya ke produk sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tingkat efektifitas dari organisasi sekolah yang memiliki presentase 26,7% dengan keterangan efisien. Pengetahuan ini dapat digunakan sebagai acuan organisasi sekolah dalam menganalisis pembiayaan yang dialokasikan pada aktivitas organisasi sehingga organisasi sekolah dapat mengevaluasi biaya yang ada untuk mencapai proses yang terintegrasi dan sesuai dengan SNP.

PENDAHULUAN

Setiap individu di setiap negara memiliki hak yakni pendidikan, pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 memaparkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Pendidikan penting dalam upaya peningkatan dari kualitas suatu sumber daya manusia. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi setiap warga negara seperti pada tujuan nasional Indonesia pada UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa [1]. Bidang pendidikan memiliki tugas untuk mencapai kuantitas pendidikan, pemerataan pendidikan atau pemenuhan hak memperoleh pendidikan saja juga harus memperhatikan kualitas penyelenggaraannya [2]. Pembiayaan organisasi termasuk pendidikan dasarnya adalah proses dari dialokasikannya suatu sumber pada suatu kegiatan atau suatu program dilaksanakannya operasional pendidikan atau dalam prosesi pengajaran di kelas. Pembiayaan menjadi masalah penting karena memiliki hubungan dengan permasalahan SDM, sarana dan prasarana, proses suatu pembelajaran dan beberapa aspek lain yang memiliki hubungan dengan keuangan [1]. Penyelenggaraan pendidikan yang efektif didukung dengan biaya yang memadai. Pembiayaan dan keuangan penting dalam proses belajar mengajar yang mengharuskan tata kelola keuangan yang mumpuni dalam terselenggaranya pendidikan. Pengelolaan keuangan tersebut dinamakan manajemen pembiayaan keuangan. Dengan manajemen yang baik tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi sekolah sekolah [3]. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, pendidikan mempunyai beberapa standar acuan yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar evaluasi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, dan standar pembiayaan. Aspek tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan harus tercapai pada setiap satuan pendidikan termasuk standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan memberi pengaruh terhadap tercapainya pendidikan Nasional [3].

Beberapa penelitian terkait penentuan biaya menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC) salah satunya Firahmy pada penelitiannya, mereka menganalisa masalah terkait estimasi biaya uang kuliah. Dari penelitian tersebut, dapat dilihat fluktuasi dan stabilitas keuangan pada STMIK Triguna Dharma dapat dipakai sebagai solusi oleh pihak yayasan. Karena segala kegiatan yang berhubungan dengan pembebanan uang kuliah dilihat dari segala aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya. Penelitian mendapatkan hasil berupa biaya pokok uang kuliah, laba yang diinginkan dapat dioptimalkan oleh pihak yayasan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, pihak yayasan dapat menentukan standarisasi tarif uang kuliah tunggal setiap tahun akademiknya [4]. Sementara itu, penelitian lain dilakukan oleh Sari & Kawedar pada Rumah Sakit Nasional Diponegoro, dimana diketahui bahwa penentuan jasa menggunakan estimasi tarif. Metode *Activity Based Costing* mengidentifikasi setiap aktivitas dan kemudian pembebanan dilakukan sesuai dengan *cost driver*. Metode *Activity Based Costing* dapat mengalokasikan biaya berdasarkan kebutuhan tiap kegiatan sehingga penentuan dari tarif lebih jelas dan akurat. Penentuan tarif yang akurat dan jelas akan mempengaruhi profitable rumah sakit [5].

Hasil rata-rata presentase margin yang didapatkan apabila menggunakan metode lebih unggul dibandingkan dengan metode yang tradisional. Biaya pada perhitungan harga pokok produksi dialokasikan ke produk sesuai dengan kegiatan yang dijalankan, sehingga mendapatkan hasil tepat dan juga tidak perlu menentukan harga jual. Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis pembiayaan pada organisasi Sekolah menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC), yang bertujuan untuk mengetahui satuan (*Unit Cost*).

METODE

Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian menyusun metodologi sangatlah penting untuk melakukan suatu tahapan yang sesuai sistem pada sebuah penelitian. Mulai dari analisis data hingga penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan data diantaranya:

1. Data primer yang digunakan yaitu data rincian aktivitas dalam bentuk model proses bisnis dari standar pembiayaan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang diuraikan menggunakan Work Breakdown Structure (WBS).
2. Data sekunder yang digunakan diantaranya :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 mengenai standar biaya operasi nonpersonalia
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 mengenai peraturan gaji PNS

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Pencapaian pendidikan yang berkualitas tak lepas dari standarisasi yang digunakan. Pendidikan sendiri mempunyai standar acuan yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar tersebut standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar pengelolaan, standar evaluasi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Standar pembiayaan pendidikan ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan (PR RI SNP). Pada Bab IX pasal 62 dari PP yang menyebutkan Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan menjabarkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat

maupun dareha dan masyarakat. Supaya penyelenggaraan pendidikan terselenggara dengan baik dibutuhkan dana yang cukup [3]. Badan yang bertugas mengembangkan, memantau, dan melaporkan capaian standar nasional pendidikan pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang memiliki kewenangan diantaranya :

1. Pengembangan SNP
2. Penyelenggaraan ujian nasional
3. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan
4. Perumusan kriteria lulusan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar maupun menengah.

Fungsi dari SNP antara lain sebagai acuan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan pendidikan guna terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas. Tujuan dari SNP antara lain untuk jaminan kualitas pendidikan nasional guna pembentukan watak, mencerdaskan kehidupan bangsa serta peradaban bangsa yang bermartabat [6].

Mengidentifikasi Hasil Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) dapat didefinisikan sebagai representasi hierarki semua aktivitas/elemen kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan lingkup pekerjaan proyek secara lengkap hingga ke level terkecil. WBS merupakan acuan pembuatan jadwal pekerjaan, perhitungan biaya, penentuan sumber daya yang dibutuhkan, perhitungan risiko pekerjaan, juga kegiatan memantau dan mengendalikan proyek. Untuk mengetahui detail aktivitas dari setiap prosesnya, standar pembiayaan menggunakan metode WBS sehingga memudahkan dalam penentuan pembiayaan organisasi pendidikan nantinya.

Tabel 1.1 Hasil WBS dari Standar Pembiayaan

Fase	Tugas	Aktivitas
Planning	Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)	<ul style="list-style-type: none"> ● Membentuk tim pengembang sekolah (TPS) ● Penetapan kondisi sekolah saat ini dengan melakukan evaluasi diri ● Kondisi sekolah yang diinginkan ditetapkan ● Kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diinginkan ditentukan ● Penyusunan kegiatan, program dan indikator kinerja ● Penyusunan RAS ● Penyusunan RKT dan RKAS ● Persetujuan oleh rapat dewan pendidik komite sekolah mempertimbangkan ● Pihak yang berwenang mengesahkan ● Pemangku kepentingan pendidikan diberikan sosialisasi
	Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)	<ul style="list-style-type: none"> ● Menginventarisasi rencana yang ingin dijalankan ● Penyusunan rencana dengan melihat skala prioritas pelaksanaan ● Program kerja serta rincian program ditentukan ● Kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program ditentukan ● Perhitungan kebutuhan dana ● Sumber dana untuk biaya rencanaditentukan
Executing Process	Penerimaan biaya pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ● Memiliki dokumen rencana jangka menengah (RKS) dan tahunan (RKAS) ● Pemahaman program instansi sumber dana

		<p>pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi program sekolah sesuai dengan instansi sumber dana • Penggunaan usulan kegiatan dengan dokumen kerangka rujukan dibuat • Usulan program yang diminta pendanaannya dipaparkan • Proses usulan dikawal sampai selesai • Efektifitas digunakannya dana yang didapat dipertanggungjawabkan
	Pengeluaran biaya pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia • Pembelanjaan disesuaikan dengan rencana • Membuat laporan keuangan oleh bendahara sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS • Melampirkan bukti bukti pengeluaran keuangan • Menunjukkan neraca keuangan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah
Monitoring and Controlling	Auditing keuangan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan standar yang dipergunakan • Kenyataan diukur dan dipertimbangkan sesuai standar • Identifikasi penyimpangan penggunaan keuangan • Tindakan perbaikan yang menjadi materi rekomendasi ditentukan
Closing	Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembukuan terhadap keseluruhan penerimaan dan pengeluaran • Melampirkan bukti atau dokumen pendukung yang sah • Mencatat kesesuaian antara anggaran dan realisasi • Melaporkan pada yayasan atau sekolah atau pemerintah kab/kota

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini, maka pembahasan akan difokuskan pada fase executing process, dimana terdapat proses penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan.

a. Penerimaan biaya sekolah

Dana pendidikan bersumber dari pemerintah baik pusat maupun daerah juga masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan Pasal 51 ayat (1). Kemudian pada ayat (4) dipaparkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah bisa bersumber dari:

1. Penganggaran pemerintah
2. Penganggaran pemerintah daerah
3. Pemungutan dari orang tua wali ataupun peserta yang dilakukan sesuai undang-undang
4. Dapat bantuan pemangku kepentingan dari satuan pendidikan
5. Dapat bantuan yang tidak mengikat dari pihak asing
6. Sumber bantuan lain yang disahkan

b. Pengeluaran biaya sekolah

Pembiayaan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 62 ayat (1) terdiri atas biaya operasi, investasi dan personal. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa biaya investasi yang disebutkan dalam ayat (1) termasuk pengembangan sumber daya manusia, modal kerja tetap biaya penyediaan sarana dan prasarana. Dalam ayat (3) yang termasuk dalam biaya pribadi yaitu pengeluaran biaya peserta didik untuk pembelajaran ayat (4) dijelaskan bahwa biaya operasi termasuk tenaga kependidikan maupun gaji pendidik dengan semua tunjangan, selain honor pendidik peralatan atau bahan pendidikan sekali pakai masuk ke dalam biaya operasi, dan ada lagi biaya operasi pendidikan tidak langsung yaitu jasa telekomunikasi, daya, air, transportasi, konsumsi, pajak, pemeliharaan sarana dan prasarana, asuransi, uang lembur, dan sebagainya [7].

Metode Activity Based Costing

Sebuah model akuntansi biaya yang dapat dipergunakan untuk pengalokasian semua biaya, didasarkan sumber daya yang dipakai untuk pemakaian aktivitas yang berkaitan merupakan *Activity Based Costing* (ABC). Penggunaan model *Activity Based Costing* ini nantinya diharapkan dapat menjadi solusi dalam penentuan dan pengaturan pembiayaan organisasi sekolah di masa depan serta memetakan biaya yang lebih sistematis dan terstruktur terkait kegiatan dan sumber daya sekolah dapat dilakukan.

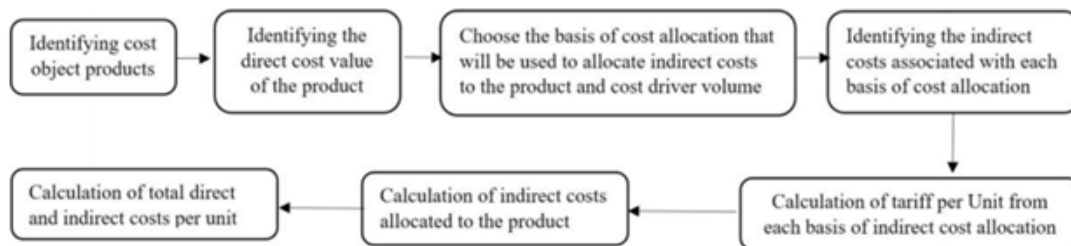
Biaya Satuan (Unit Cost)

Unit Cost adalah pengeluaran biaya oleh organisasi untuk produksi, penyimpanan dan penjualan satu unit produk dari produk tertentu. Biaya unit memiliki cakupan semua biaya tetap dan semua biaya variabel yang terlibat dalam produksi. Jika disederhanakan, *unit cost* yaitu biaya per-unit produk atau biaya per-layanan. Definisi *unit cost* sebagai hasil bagi total cost yang dibutuhkan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, produk barang maupun jasa. Biaya satuan (*unit cost*) yaitu biaya pembagian satu satuan produk pelayanan dihitung dengan *total cost* dengan kualitas/jumlah output ($(unit\ cost)\ UC = (total\ cost)\ TC / (total\ output)\ TO$). Dapat disederhanakan sebagai “rata-rata”. Yaitu hasil pembagian biaya total dengan jumlah produksi. Ada dua jenis biaya satuan yaitu biaya satuan aktual dan satuan normatif [8].

Activity-based costing (ABC)

Metode *Activity-Based Costing* (ABC) adalah proses kalkulasi biaya yang pertama kali melakukan penelusuran biaya ke kegiatan dan kemudian ke produk. Sistem akuntansi biaya tradisional menghasilkan informasi biaya produk yang terdistorsi, hal ini terjadi dikarenakan adanya tidak akuratnya pembebanan biaya, yang berakibat salahnya penentuan suatu biaya, perencanaan, pembuatan putusan, dan kendali. Distorsi menyebabkan *undercost/overcost* terhadap sebuah produk. Perkembangan ilmu pengetahuan menciptakan suatu sistem yang menentukan harga pokok produk yang bergantung kegiatan yang dibuat guna perbaikan akibat distorsi akuntansi biaya secara tradisional. Sistem akuntansi ini dinamakan *Activity-Based Costing* [9].

Perhitungan Unit Cost Metode ABC



Gambar 1. Alur metode ABC

Pada Gambar 1 merupakan alur dari perhitungan *Unit Cost* dari metode ABC (*Activity-based costing*), di bawah ini merupakan keterangan dari alur perhitungan [10]:

- a. Identifikasi produk objek biaya.
- b. Identifikasi nilai biaya langsung dari produk. Dari biaya langsung yang sudah ditentukan, maka dilanjutkan menentukan nilai/ value biaya tersebut.
- c. Dasar alokasi biaya yang akan digunakan dipilih dan biaya tak langsung dialokasikan ke produk dan *volume cost driver*. Merinci *cost driver* untuk jumlah dan volume serta nilainya.
- d. Identifikasi biaya tidak langsung dasar alokasi biaya.
- e. Tarif per-unit dasar alokasi biaya tak langsung dihitung.
- f. Biaya tidak langsung produk dihitung.
- g. Total biaya tiap unit langsung dan tak langsung dihitung.

No.	Sekolah/ Program Keahlian	Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu)			% Minimum untuk ATS	% Minimum untuk BAHP
		Per Sekolah/ Program Keahlian	Per Rombongan Belajar	Per Peserta Didik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI	97.440	16.240	580	10	10
2.	SMP/MTs	136.320	22.720	710	10	10
3.	SMA/MA Bahasa	184.320	30.720	960	10	10
4.	SMA/MA IPS	184.320	30.720	960	10	10
5.	SMA/MA IPA	193.920	32.320	1.010	10	10
6.	SDLB Tunalaras	88.200	14.700	2.940	10	10
7.	SDLB Tunadaksa	89.100	14.850	2.970	10	10
8.	SDLB Tunagrahita	89.400	14.900	2.980	10	10
9.	SDLB Tunarungu	90.300	15.050	3.010	10	10
10.	SDLB Tunanetra	97.200	16.200	3.240	25	5
11.	SMPLB Tunalaras	104.160	34.720	4.340	10	10
12.	SMPLB Tunadaksa	108.960	36.320	4.540	10	10
13.	SMPLB Tunagrahita	107.280	35.760	4.470	10	10
14.	SMPLB Tunarungu	108.840	36.280	4.535	10	10
15.	SMPLB Tunanetra	117.840	39.280	4.910	20	5
16.	SMALB Tunadaksa	121.680	40.560	5.070	10	10
17.	SMALB Tunagrahita	120.960	40.320	5.040	10	10
18.	SMALB Tunarungu	121.920	40.640	5.080	10	10
19.	SMALB Tunanetra	138.720	46.240	5.780	20	10
	SMK Non Teknik					

Gambar 2. Standar Biaya Non Operasional

Pada Gambar 2 merupakan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 mengenai standar biaya operasi nonpersonalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK, SDLB, SMALB dan SMPLB yang diterapkan pada tahun 2009 di DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *Activity-Based Costing*

Activity-Based Costing (ABC) diterapkan untuk pengurangan kegiatan yang tidak menambah nilai, tidak menambah produk atau jasa yang juga mengurangi kegiatan yang menyebabkan tidak sesuai dengan harapan di masa depan atau tidak terciptanya nilai tambah. Kelemahan dari metode ini terdistorsinya informasi biaya dan hal tersebut disebabkan tidak akuratnya pembuatan keputusan, pembebanan biaya, pengendalian, dan perencanaan.

Alur menyusun hingga pengimplementasian *Activity-Based Costing*, yaitu [11]:

1. Seluruh informasi keuangan perusahaan ditinjau ulang.
2. Tujuan penerapan *Activity-Based Costing System* ditentukan.
3. Penetapan kegiatan utama yang guna perubahan beban tak langsung
4. Biaya tak langsung dihubungkan dengan kegiatan yang dapat dihitung tarifnya (*Rate*) per unit pada tiap dasar alokasi yang dipakai untuk pembebanan biaya tak langsung.
5. Biaya tidak langsung pada objek biaya dihitung.
6. Perhitungan total biaya pada setiap objek
7. Memperbaiki dan mengambil keputusan yang relevan.

Penerapan sistem *Activity-Based Costing* memberi manfaat, seperti di bawah ini [11]:

1. Identifikasi tidak efisiennya pada detail setiap proses kegiatan dapat dibantu dengan mudah
2. Keputusan dalam menghitung biaya lebih akurat
3. Pengendalian biaya pada setiap level dapat dibantu dengan mudah.

Tabel 1. Alokasi dana untuk Standar Pembiayaan Pendidikan

No.	Kegunaan Dana	Jumlah (Rp.)
1.	Konsumsi guru/pegawai	2.331.000,00;
2.	Menyelenggarakan sosialisasi dan pelaporan program	1.093.900,00;
3.	Pembayaran rekening listrik	900.000,00;
4.	Pembayaran langganan internet	750.000,00;
5.	Pembayaran langganan PDAM	900.000,00;
6.	Membayar gaji guru tidak tetap	3.260.000,00;
7.	Membayar gaji penjaga sekolah/satpam/pegawai	1.320.000,00;
8.	Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	80.000,00;
9.	Bantuan siswa miskin	125.000,00;
10.	Pembelian kebutuhan UKS	420.000,00;
Jumlah		11.179.900,00;

Pada Tabel 1, jenis pengeluaran di sekolah dikelompokkan dalam 10 jenis biaya antara lain: konsumsi guru/pegawai; penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program; pembayaran rekening listrik, pembayaran langganan internet, pembayaran langganan PDAM, pembayaran honor guru tidak tetap, pembayaran honor penjaga sekolah/satpam/pegawai; penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan; bantuan siswa miskin; dan pembelian kebutuhan UKS. Ditentukannya biaya pendidikan menggunakan metode *Activity Based Costing* untuk awalnya melakukan survey kegiatan yang dilakukan dalam terselenggaranya pendidikan di sekolah. Kegiatan tersebut secara dasar dibedakan menjadi dua jenis pusat kegiatan, yaitu kegiatan utama dan kegiatan penunjang.

Tabel 2. Jenis-jenis pusat aktivitas

Aktivitas Utama	Aktivitas Penunjang
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program	Konsumsi Guru/Pegawai
Pembayaran honor guru tidak tetap	Pembayaran rekening listrik
Pembayaran penjaga sekolah/satpam/pegawai	Pembayaran langganan internet
Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	Pembayaran langganan PDAM
Bantuan siswa miskin	
Pembelian kebutuhan UKS	

Pada Tabel 2, Disajikan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah berdasarkan pengelompokan elemen biaya sesuai dengan pusat aktivitas. Selanjutnya melakukan pembebanan biaya dengan metode penelusuran penggerak (*driver tracing*) dan penelusuran langsung (*direct tracing*) serta alokasi.

Tabel 3. Pembebanan Sumber Daya ke dalam Kegiatan

Macam Kegiatan	Dasar Alokasi	Cost Driver
Konsumsi Guru/pegawai	<i>Direct Tracking</i>	Jumlah guru/pegawai
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program	Perkiraan alokasi	Jumlah siswa
Pembayaran rekening listrik	<i>Direct Tracking</i>	KWH
Pembayaran langganan internet	<i>Direct Tracking</i>	Mbps
Pembayaran langganan PDAM	<i>Direct Tracking</i>	m3
Pembayaran honor guru tidak tetap	<i>Direct Tracking</i>	Jam mengajar
Pembayaran honor penjaga sekolah/satpam/pegawai	<i>Direct Tracking</i>	Jam kerja
Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	Alokasi dengan perkiraan	Jumlah pembayaran/tahun
Bantuan siswa miskin	<i>Direct Tracking</i>	Jumlah siswa

Pembelian kebutuhan UKS	Alokasi dengan perkiraan	Jumlah pembayaran
-------------------------	--------------------------	-------------------

Pada Tabel 3, berbagai kegiatan yang ada di sekolah pengalokasian didasarkan dengan perhitungan perkiraan dengan penentuan presentase pengeluaran jenis biaya dibagi dengan jumlah yang biaya yang diterima oleh sekolah.

Tabel 4. Penerimaan Sekolah Tahun 2015/2016

No.	Sumber Dana	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Operasional Sekolah Pusat	27.200.000,00;
2.	Bantuan Operasional Sekolah Provinsi	4.840.000,00;
3.	Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten	8.140.000,00;
Jumlah		40.180.000,00;

Pada Tabel 4, diperlihatkan penerimaan yang diterima oleh sekolah, perolehan jumlah penerimaan pada tabel tersebut diterima dalam satu tahun, selanjutnya perhitungan persentase dasar alokasi untuk setiap jenis biaya. Lalu penentuan *cost driver* dan perhitungan berapa kali penggunaan atau berapa lama/kali pengeluaran jenis biaya dalam setahun. Kemudian perhitungan berapa besar presentase dari *cost driver* dalam rupiah sebagai biaya pembebanan.

Tabel 5. Perhitungan Keuangan Sekolah Tahun 2015/2016

Jenis Kegiatan	Dasar Alokasi *)	<i>Cost driver</i> **)	Biaya dibebankan **)
Konsumsi guru/pegawai	5,8% dari pendapatan	11 guru	Rp 2.330.440
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program	2,7% dari pendapatan	34 siswa	Rp 1.084.860
Pembayaran rekening listrik	<i>Direct Tracing</i>	-	Rp 900.000
Bayar internet	<i>Direct Tracing</i>	-	Rp 750.000
Bayar PDAM	<i>Direct Tracing</i>	-	Rp 900.000
Gaji guru tidak tetap	8,1% dari pendapatan	-	Rp 3.254.000
Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai	3,2% dari pendapatan	-	Rp 1.285.000
Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan	0,19% dari pendapatan	-	Rp 76.342
Bantuan siswa miskin	0,31% dari pendapatan	-	Rp 124.558
Pembelian kebutuhan UKS	1% dari pendapatan	-	Rp 401.800
Jumlah			Rp 11.107.000

KETERANGAN :

- *) Tiap jenis pengeluaran jumlah biayanya dibagi jumlah pendapatan
- ***) Perhitungan biaya yang dikeluarkan sesuai data laporan keuangan
- ***) Besar % dihitung dari dasar alokasi

Pada Tabel 5. Menghitung keuangan tiap siswa per-bulan dengan metode ABC. Jumlah pembebanan tersebut merupakan jumlah tarif yang harus dibayarkan oleh tiap siswa per bulan.

Tabel 6. Perhitungan Tarif Keuangan menggunakan Metode ABC Tahun 2015/2016

Total siswa	Pembebanan Biaya	Besaran SPP (dibagi jumlah siswa)	
		Per tahun	Per bulan
34	Rp. 11.107.00,00;	Rp.326.676	Rp.27.223

Pada Tabel 6, menghitung tarif uang biaya pendidikan yang dihitung dengan metode ABC, hasil yang diperoleh hampir mendekati dikarenakan selisih yang kecil. Biaya per unit akan memungkinkan lebih rendah apabila semakin banyaknya jumlahnya siswa. Selanjutnya mengukur *value for money* yaitu efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi pada sekolah.

Menghitung efektivitas

Tingkat efektivitas = (target penerimaan) x 100%

Menghitung efektifitas anggaran biaya pada tahun ajaran 2015/2016

Target penerimaan = 34 x Rp. 27.223 x 12 bulan = Rp 11.106.984

Tingkat efektivitas = (Rp. 40.180.000/Rp 11.106.984) x 100% = 362%

Menghitung efisiensi

Tingkat efisiensi = (keluaran riil/anggaran) x 100%

Tabel 7. Menghitung Efisiensi Untuk Jumlah Biaya Pendidikan pada Metode ABC

Tahun	Keluaran	Anggaran	Efisiensi	Kriteria
2015/2016	Rp. 11.107.900,00;	Rp. 40.180.000,00;	27,6%	Efisien

Pada Tabel 7. Disajikan hasil hitung efisiensi dari jumlah biaya pendidikan pada metode ABC. Apabila dilihat dari nilai prosentase efisiensinya, sistem manajemen dari sekolah termasuk efisien karena memiliki persentase 27,6%. Hasil perhitungan ini digunakan untuk melakukan evaluasi pada organisasi sekolah agar dapat dilakukan perbaikan startegi untuk manajemen sekolah yang lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.

KESIMPULAN

Dari penelitian tentang analisis pembiayaan pendidikan di sekolah dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan di SDN Ngrojo Nanggung Kulon Progo tiap siswa per-bulannya menggunakan metode *Activity-Based Costing* (ABC) pada tahun ajaran 2015/2016 adalah Rp 27.223. Pengelolaan sekolah tahun 2015/2016 sudah efektif dan efisien, dibuktikan dengan hasil perhitungan sebesar 326% dan 27,3. Faktor efisien dan efektif tersebut diperiksa dari sarana dan prasarana; pembiayaan; serta layanan pembelajaran. Penelitian ini

diharapkan bisa memberikan informasi yang berguna guna perkembangan manajemen pendidikan di sekolah. Maka dari itu, diperlukan perbaikan strategi dalam manajemennya guna memperoleh organisasi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya.

REFERENSI

- [1] H. Yuliani, "PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO NANGGULAN KULON PROGO," *Hanata Widya*, pp. 54–68, 2016.
- [2] F. Alawiyah, "National Standards of Primary and Secondary Education," *Aspirasi*, vol. 8 no., pp. 81–92, 2017.
- [3] Masadit, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu," *ANSIRU*, vol. 1 no., pp. 119–145, 2017.
- [4] F. dkk Rizky, "Implementasi Metode Activity Based Costing (ABC) dalam Estimasi Tarif Uang Kuliah setiap Tahunnya (Studi Kasus: STMIK Triguna Dharma)," *J. Ilm. Saindikom*, vol. Vol. 16 No, 2017.
- [5] Sari, S. Widia, and K. Warsito, "Implementasi Metode Activity Based Costing (ABC) dalam Menentukan Unit Cost Poliklinik (Studi Kasus: Rumah Sakit Nasional Diponegoro)," *Diponegoro J. Account.*, 2018.
- [6] S. Herdayati, "Standar Nasional Pendidikan Dasar dalam PP Nomor 32 Tahun 2013: Konsep dan Penerapan, Permasalahan dan Tantangan, Prinsip Model Mutu Total di Sekolah Dasar," 2019.
- [7] M. Handayani, "Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA di Provinsi DKI Jakarta," *J. Pendidik. dan Kebud.*, vol. Vol.1 Nomo, 2016.
- [8] D. A. Putri, "ACTIVITY BASED COSTING SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENENTUKAN TARIF SPP SMP-SMA PADA YPI NASIMA SEMARANG TAHUN 2010," pp. 1–27, 2010.
- [9] Z. H. A. Syahr, A. Purwanti, and I. G. K. A. Ulupui, "ANALISIS KOMPARASI BIAYA PENDIDIKAN ANTARA METODE TRADISIONAL DENGAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM PADA MADRASAH DINIYAH AL-BURHANIYAH," *J. Organ. dan Manaj.*, vol. 12(1), pp. 39–53, 2016.
- [10] A. S. Nuha, M. F. Hakim, W. A. Lathifah, and M. A. Yaqin, "PERHITUNGAN UNIT COST PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH DENGAN METODE ABC (ACTIVITY BASED COSTING) PERHITUNGAN UNIT COST PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH DENGAN METODE ABC (ACTIVITY BASED COSTING)," no. December 2019, 2020.
- [11] B. et al. Kaunang, "PENERAPAN METODE ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM DALAM MENENTUKAN BESARNYA TARIF JASA RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM BETHESDA," vol. 3(1), p. pp.1214–1221, 2015.